

# AGAMA DAM PERILAKU POLITIK

Oleh: Ajat Sudrajat  
Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY

## Abstrak

Manusia dan agama merupakan pasangan yang senantiasa mewarnai kehidupan. Tidak ada manusia yang tidak beragama. Agama merupakan bagian kehidupan manusia. Corak dan warna kehidupan seseorang akan dipengaruhi oleh agamanya. Kenyataan ini menjadikan manusia disebut 'homo religius'.

Pada saat agama mempengaruhi kehidupan seseorang, di saat yang sama corak pemikiran dan pemahaman keagamaan seseorang akan pula berimplikasi terhadap kehidupannya. Dalam perkembangannya, yang kemudian ikut membentuk sikap dan perilaku seseorang, adalah corak dan pemahaman keagamaan.

Politik, sebagai bagian dari perilaku manusia, adalah di antara bagian yang terkena konsekuensinya. Corak pemikiran dan pemahaman keagamaan seseorang dalam batas tertentu mempengaruhi perilaku politiknya. Signifikansi corak pemikiran dan pemahaman keagamaan terlihat antara lain dalam afiliasi dan saluran politik seseorang.

## Pendahuluan

Adanya hubungan yang demikian kuat antara manusia dan agama, menyebabkan manusia disebut sebagai homo religius. Menurut Mircea Eliade, homo religius adalah tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral, penuh dengan nilai-nilai religius dan dapat menikmati sakralitas yang ada dan tampak pada alam semesta. Pengalaman dan penghayatan akan yang suci atau realitas mutlak (*ultimate reality*) selanjutnya mempengaruhi, membentuk dan ikut menentukan corak serta cara hidupnya<sup>1</sup>.

Membicarakan hubungan nilai-nilai agama dengan perilaku politik rasanya sejalan benar dengan penelitian Weber tentang pengaruh nilai-nilai agama terhadap perilaku ekonomi. Dalam bukunya yang terkenal, *The Protestant Ethic and the Spirit*

---

<sup>1</sup> Sastrapratedja (ed.), *Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1982, hal.38.

*of Capitalism*, Weber berusaha menjelaskan mengapa kapitalisme modern berkembang di Eropa Barat dan Amerika, dan tidak berkembang di wilayah lainnya. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa suatu kegiatan unik yang bersifat keagamaan, yaitu reformasi Protestan (Calvinisme), telah melahirkan nilai-nilai baru secara mendasar, yang memberikan pengesahan kepada usaha-usaha yang bercorak ekonomi<sup>2</sup>. Agama diakui telah memperjelas nilai-nilai dan norma-norma kehidupan daripada aspek apapun dalam masyarakat. Artinya bahwa agama merupakan salah satu di antara sumber nilai yang penting, yang menunjang budaya politik masyarakat.

Tulisan ini akan mencoba menelusuri keterkaitan antara agama dan perilaku politik seseorang. Apakah memang ada kaitan antara agama dan corak pemikiran atau pemahaman keagamaan seseorang terhadap agamanya dengan perilaku politiknya?.

### **Perbedaan Corak Pemikiran dalam Islam**

Salah satu penyebab terpolarisasinya umat Islam ke dalam beberapa kelompok antara lain berkenaan dengan corak pemikiran atau pemahaman mereka dalam menghadapi masalah-masalah keagamaan. Bagi Muhammad Abduh misalnya, Islam adalah agama yang rasional, agama yang sejalan dengan akal, bahkan agama yang didasarkan atas akal<sup>3</sup>. Pemikiran rasional, baginya, adalah jalan untuk memperoleh iman yang sejati.

Penggunaan akal yang dominan dan anjurannya untuk langsung memahaminya dari al-Qur'an dan al-Sunnah, menjadikan ijtihad sebagai alat utama dalam menghadapi masalah-masalah keagamaan. Karena corak pemikirannya yang

---

<sup>2</sup> Ajat Sudrajat, *Etika Protestan dan Kapitalisme Barat: Relevansinya dengan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hal. 1-11.

<sup>3</sup> Harun Nasution, *Muhammad Abduh Dan Teologi Rasional Mu'tazilah*, Jakarta: UI Press, 1987, hal. 45.

demikian, para ahli Islam menempatkan Abduh dalam jajaran kaum modernis atau reformis. Langkah yang dilakukan Abduh dan para pendahulunya yang mengedapankan akal, terus diikuti oleh sejumlah pemuka Islam sesudahnya, termasuk umat Islam di Indonesia. Di antaranya adalah tokoh-tokoh di lingkungan PERSIS (Persatuan Islam) dan Muhammadiyah<sup>4</sup>.

Bagi kalangan reformis dan modernis, al-Qur'an telah memuat kebenaran-kebenaran yang fundamental. Kebenaran-kebenaran itu harus diaplikasikan kembali ke dalam kondisi mutakhir. Jalan yang dapat dilakukan untuk mengaplikasikannya adalah ijtihad, yaitu kajian terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah untuk menemukan ketentuan-ketentuan hukum dan ajaran-ajaran moral yang termuat di dalamnya, dan menerapkannya ke dalam situasi kekinian. Namun demikian, sekalipun langsung kepada al-Qur'an dan al-Sunnah tidak berarti kelompok ini menolak produk-produk ijtihad yang dibuat oleh ulama-ulama klasik. Hasil ijtihad itu tetap digunakan sebagai panduan dalam memutuskan persoalan-persoalan yang baru. Baik Persatuan Islam maupun Muhammadiyah tetap menempatkan hasil ijtihad ulama terdahulu sebagai referensi dalam menghasilkan ijtihad barunya<sup>5</sup>.

Kebalikan dari corak pemikiran kaum reformis dan modernis adalah yang dilakukan oleh kalangan tradisionalis. Kaum Muslim tradisionalis berkeyakinan bahwa akal manusia secara umum tidak mampu memahami perintah Tuhan tanpa bimbingan. Mereka berpendapat bahwa para pendiri mazhab yang telah mengkaji, mengumpulkan, menjelaskan dan menafsirkan perintah-perintah dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, telah membuktikan dirinya sebagai pembimbing yang terpercaya. Oleh karena itu hasil dari ijtihad mereka harus dijadikan pegangan dan tidak perlu ada perubahan. Kaum tradisionalis berpendapat bahwa ijtihad, sekalipun merupakan

---

<sup>4</sup> Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*, terj. Yudian W. Aswin dan Afandi Mochtar, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996, hal.62-63.

<sup>5</sup> Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam...*, hal.65.

instrumen yang telah digunakan oleh para pendiri mazhab, dewasa ini tidak bisa digunakan lagi. Oleh karena itu jalan yang harus ditempuh adalah dengan cara bertaklid<sup>6</sup>.

Perbedaan yang bercorak pemikiran dalam Islam, yang hasilnya terlihat ketika memahami ajaran agama, dapat dibedakan ke dalam beberapa tipologi. Model tipologi yang dikemukakan Allan Samson, membedakannya ke dalam kelompok fundamentalis, reformis, dan akomodasionis<sup>7</sup>. Kelompok *fundamentalis* mewakili bentuk pemikiran yang kaku dalam melakukan penafsiran. Mereka juga menentang pemikiran sekuler, pemikiran Barat dan kepercayaan yang sinkretis. Dalam politik mereka menempatkan agama di atas negara atau kekuasaan politik. Bagi mereka kekuasaan politik yang sah adalah kekuasaan politik yang bersifat keagamaan. Kelompok *reformis* dalam bidang politik memiliki faham yang sama dengan kalangan fundamentalis yang menekankan agama atas negara. Akan tetapi kelompok kedua ini mau menjalin kerjasama dengan pemerintahan sekuler. Kelompok ini memiliki keyakinan bahwa Islam relevan dengan era modern. Kemudian yang ketiga adalah kelompok *akomodasionis*. Kelompok akomodasionis memberi penghargaan yang tinggi terhadap kerangka persatuan yang diberikan Islam, tetapi berpegang pada pandangan bahwa kepentingan-kepentingan sosial dan ekonomi harus mendapat prioritas utama oleh organisasi-organisasi Islam. Lebih jauh, mereka bisa menjalin kerjasama secara baik dengan lembaga-lembaga sekuler. Dalam bidang politik, kelompok terakhir ini, bersedia menurunkan tuntutan ideologis dan politisnya, untuk mendapatkan jaminan-jaminan administratif dan politik.

### **Pembentukan Perilaku Politik**

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 64.

<sup>7</sup> Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998, hal. 42-43.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku politik memiliki arti yang sangat luas. Keluasan arti perilaku politik bukan saja karena perilaku politik merupakan perilaku setiap warga negara di hadapan negara, melainkan karena perilaku politik menyangkut bidang-bidang kehidupan lain yang demikian kompleks (sosial, ekonomi, budaya, dan politik itu sendiri).

Menurut Smith<sup>8</sup> ada tiga hal pokok dalam agama yang secara psikologis menentukan pembentukan sikap dan perilaku politik: (1) otoritas *dogmatis*, atau kebenaran yang bersifat mutlak; (2) otoritas *terarah*, atau ketuntasan pengaturan; dan (3) *pelembagaan otoritas*, atau pepaduan pemahaman dan penggunaan kebenaran mutlak dalam perumusan aturan yang memperkuat struktur keagamaan.

Otoritas *dogmatis* dalam Islam sangat kuat. Kebenaran Islam diyakini mutlak, universal dan tidak dapat diubah. Wahyu al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw adalah wahyu terakhir untuk menuntun kepentingan hidup seluruh umat manusia.

Otoritas *terarah*, yang merupakan seperangkat aturan komprehensif yang harus ditaati oleh umat Islam, terdapat dalam syari'ah. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa syari'ah lebih luas daripada sekedar sistem hukum. Ia merupakan katalog komprehensif perintah-perintah dan aturan-aturan Allah untuk membimbing umat Islam. Cakupan syari'ah begitu luas yang meliputi hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan masyarakatnya.

*Pelembagaan otoritas* adalah adanya hirarki kepemimpinan yang terorganisasi dalam Islam yang akan mengawal pelaksanaan dan berlakunya syari'ah. Dalam Islam, organisasi hirarkial keagamaan seperti yang dimiliki gereja tidak ada, oleh karena itu kelembagaan seperti ini diserahkan kepada umat atau negara. Dalam hal inilah kemudian muncul jargon politik yang dikemukakan oleh sejumlah gerakan

---

<sup>8</sup> Donald Eugene Smith, *Agama dan Modernisasi Politik*, Jakarta: Rajawali Press, 1985, hal. 224.

Islam bahwa Islam adalah *din wa al-daulah*<sup>9</sup>. Islam merupakan sistem keberadaan yang total, yang secara universal sesuai dengan semua keadaan, waktu dan tempat. Syari'ah Islam bersifat inheren, al-Qur'an memberikan syari'ah dan negara memperkuatnya. Pemisahan antara agama dan negara tidak dapat diterima. Atau dalam pernyataan lain corak kehidupan yang sekuleristik, yang meminggirkan agama dari pentas kehidupan manusia, tidak bisa diterima.

Perilaku politik menurut Sudijono Sastroatmodjo ditentukan pula oleh identitas bersama yang dimiliki masyarakat<sup>10</sup>. Faktor pembentuk identitas bersama itu menurut Ramlan Surbakti mencakup identitas primordial, sakral, personal, dan civilitas<sup>11</sup>. Faktor primordial antara lain berupa kekerabatan, kesukuan, kebahasaan, kedaerahan, dan adat istiadat. Dengan demikian ketika seseorang mengeskpresikan perilaku politiknya, kemungkinan yang bersangkutan menyandarkannya kepada faktor kekerabatan, satu suku, bahasa, daerah, dan adat istiadat.

Faktor sakral pada umumnya didasarkan karena keagamaan yang sama. Dengan demikian, adanya pluralitas agama dan corak pemikiran keagamaan dalam suatu agama dengan sendirinya dapat pula membentuk perilaku politik seseorang. Faktor personal biasanya disandarkan kepada seseorang. Ketokohan seseorang menjadi identifikasi suatu kelompok masyarakat. Dalam mengekspresikan perilaku politiknya, suatu masyarakat melihat perilaku politik yang diperlihatkan oleh sosok yang menjadi panutannya

Faktor lain yang ikut membentuk perilaku politik seorang warga negara adalah yang berupa faktor sipil. Faktor sipil ini antara lain terlihat dalam tatanan kehidupan di masyarakat berupa keadilan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan

---

<sup>9</sup> Shireen T. Hunter, *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, terj. Ajat Sudrajat, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001, hal. 16.

<sup>10</sup> Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995, hal, 228.

<sup>11</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiaswara Indonesia, 1982, hal. 44-47.

budaya. Terwujudnya rasa keadilan yang dirasakan seorang warga negara dalam berbagai bidang kehidupan misalnya, akan mendorong dirinya untuk mendukung pemerintahan yang ada. Dukungan yang diberikan kepada pemerintah ini dapat saja mengatasi (*mentransendensi*) faktor-faktor di atas. Ia mendukung suatu pemerintahan bukan karena presidennya memiliki kesamaan suku, agama, atau kepribadiannya, melainkan lebih karena presiden itu dapat menyelenggarakan pemerintahan yang adil.

### **Agama dan Politik (Contoh Kasus di Barat)**

Secara historis penciptaan suatu identitas bersama sebagian didasarkan pada identitas agama. Sampai abad kesembilan belas, orang belum membuat perbedaan yang tegas antara yang spiritual dan sekuler, antara yang suci dan yang fana (*profane*). Pada umumnya, nilai-nilai sakral memberikan rasa solidaritas sosial yang kuat. Dengan adanya komunitas-komunitas etnis yang relatif homogen dan munculnya negara-bangsa yang sekuler, dasar-dasar yang bercorak sakral belum juga hilang<sup>12</sup>.

Pola-pola suara (pemilih) kelompok keagamaan di Amerika Serikat yang telah diteliti lebih dari lima dekade juga memperlihatkan adanya hubungan antara agama yang di anut seseorang dengan kehidupan politik. Ada kecenderungan di kalangan Protestan untuk lebih memilih Partai Republik, sedangkan orang-orang Katolik dan Yahudi cenderung memilih Partai Demokrat. Centres melaporkan suatu korelasi (0.36) antara Protestantisme dan Partai Republik; dan Lenski menunjukkan kemungkinan suara untuk Partai Republik dari berbagai agama dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, yaitu: Protestan kulit putih, Katolik kulit putih, Protestan Negro, dan Yahudi. Pada umumnya studi-studi yang ada menunjukkan

---

<sup>12</sup> Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, terj. Lukman Hakim, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992, hal. 92.

bahwa orang-orang Protestan memiliki kecenderungan untuk memilih Partai Republik<sup>13</sup>.

Pola-pola suara kelompok keagamaan sebagian berkaitan dengan faktor-faktor sosio-ekonomi, dan terdapat adanya tanda-tanda bahwa pola-pola suara ini berubah secara perlahan. Kebanyakan hasil studi mengenai suara (pemilih) dalam kaitannya dengan keanggotaan kelompok keagamaan menunjukkan bahwa kelompok-kelompok keagamaan minoritas cenderung untuk mendukung partai politik yang liberal. Hubungan ini tidak didasarkan pada keyakinan keagamaan atau tingkah laku keagamaan, melainkan semata-mata karena keberadaannya sebagai kelompok minoritas. Penjelasan ini terutama diperlakukan kepada Katolik, baik di Amerika maupun di Inggris<sup>14</sup>.

Dalam menjelaskan hubungan antara keanggotaan kelompok keagamaan dengan suara (pemilih), Janowitz dan Segal menyatakan bahwa kedudukan Katolik yang minoritas di Amerika Serikat telah menyebabkan corak politik mereka bersifat liberal. Faktor-faktor lain adalah karena kebanyakan orang Katolik merupakan kaum imigran<sup>15</sup>. Sementara itu dikemukakan oleh Alford bahwa kenyataan orang Katolik Roma di Amerika Serikat dan Inggris cenderung memilih partai kiri<sup>16</sup>.

Menurut Anderson, pola suara (pemilih) kelompok keagamaan bukan disebabkan karena perbedaan ideologis, tetapi semata merupakan tradisi yang berkembang dalam sub-kelompok keagamaan tersebut. Ia menyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam komunitas keagamaan lebih suka untuk mengikuti pola suara yang ada dalam kelompoknya. Namun demikian menurutnya ada pengecualian

---

<sup>13</sup> Michael Argyle and Benjamin Beit-Hallahmi, *The Social Psychology of Religion*, London: Routledge & Kegan Paul, 1975, hal. 101.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 103.

<sup>15</sup> Janowitz, M. and Segal, D.R., "Social Cleavage and Party Affiliation: Germany, Great Britain, and the United States", *American Journal of Sociology*, 72, hal. 601-618.

<sup>16</sup> Michael Argyle dan Benjamin Beit-Hallahmi, *op. cit.*, hal. 104.

dalam kasus Katolik, karena pemilihan terhadap Partai Demokrat bagi mereka tanpa menghiraukan keterlibatan komunitas<sup>17</sup>.

Di lain pihak terdapat pula studi yang mempertimbangkan keberadaan 'keyakinan keagamaan' dalam kaitannya dengan politik di Amerika Serikat. Johnson misalnya, ia menegaskan bahwa faktor-faktor keagamaan dengan sendirinya secara signifikan merupakan bagian penting dari kecenderungan perseorangan yang terlibat dalam kelompok keagamaan. Menurutnya orang-orang yang berfaham fundamentalis lebih suka untuk memberikan suaranya kepada Partai Republik, sekalipun ia memiliki status sosial-ekonomi yang lebih rendah; dan orang-orang yang berfaham modernis lebih suka memberikan suaranya kepada Partai Demokrat, sekalipun memiliki status sosial-ekonomi yang tinggi<sup>18</sup>.

Dinyatakan juga oleh Parenti bahwa terdapat adanya hubungan yang konsisten antara budaya keagamaan berdasarkan pada keyakinan dan tradisi, yaitu mengenai sikap mereka terhadap dunia ini dan tanggung jawab di dalamnya, dengan kedudukan politik dari kelompok keagamaan. Adanya konservatisme dalam kasus Katolik, karena Katolik menekankan pada adanya dogma yang tetap dan dosa individual (warisan)<sup>19</sup>.

Glock dan Stark menunjukkan bahwa di kalangan Protestan Amerika Serikat, tingkat kehadiran di gereja yang memilih Partai Demokrat lebih rendah dibanding dengan mereka yang memilih Partai Republik. Dikemukakan pula oleh Anderson tentang adanya korelasi yang sama di kalangan Protestan antara kehadiran di gereja dengan pilihan bagi Partai Republik. Sementara Hidden menunjukkan bahwa di kalangan mahasiswa terdapat adanya korelasi yang positif antara menjadi orang Partai Republik dengan skor yang tinggi mengenai konservatisme keagamaan.

---

<sup>17</sup> Anderson, C.H., "Religious Community Among White Protestants, Catholics, and Mormons", *Social Forces*, 46, hal. 501-508, dalam Michael Argyle, *The Social Psychology*, hal. 104.

<sup>18</sup> Michael Argyle, *The Social Psychology...*, hal. 105.

<sup>19</sup> *Ibid.*

Kemudian Bender memperlihatkan bahwa dalam suatu kelompok usia-menengah, kalangan terdidik, dan kalangan kelas menengah-atas, yang hadir di gereja cenderung untuk memilih Partai Republik<sup>20</sup>.

Hubungan antar keyakinan keagamaan yang konservatif dengan sikap anti komunis di Amerika Serikat ditunjukkan oleh beberapa studi. Stouffer menunjukkan bahwa ketakutan terhadap komunisme di kalangan penduduk Amerika Serikat pada umumnya karena didasarkan pada sifat 'ateistik dan anti-Kristen'. Kosa dan Nunn mengemukakan bahwa unsur keagamaan secara positif berhubungan dengan pengungkapan sikap 'intoleran' terhadap komunisme. Sikap yang demikian terjadi pada baik orang kulit putih maupun negro. Menurut Hoge, di kalangan mahasiswa Amerika Serikat ditemukan adanya korelasi yang positif antara sikap anti komunis dengan sikap ortodoksi keagamaan mereka<sup>21</sup>.

Di kalangan kelompok-kelompok keagamaan Amerika, orang-orang Yahudi ditemukan lebih radikal berkenaan dengan isu-isu politik. Dalam studi yang dilakukan Allinsmith and Allinsmith dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi tetap konsisten dengan sikap liberalnya ketika berhadapan dengan semua isu sosial dan politik. Sikap ini diambil tanpa menghiraukan posisi sosial ekonomi mereka. Sikap orang-orang Katolik dan Protestan lebih berhubungan dengan status sosial ekonomi mereka. Dengan demikian orang-orang Katolik dan Protestan fundamentalis, yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih rendah, lebih tertarik pada program-program kesejahteraan, tetapi konservatif terhadap isu-isu politik. Kalangan kelas atas Protestan lebih liberal terhadap terhadap isu politik, sebanding dengan semua kelompok-kelompok Katolik dan Protestan<sup>22</sup>.

### **Akhirnya: Beberapa Penelitian di Indonesia**

Hasil penelitian yang mengkaji tentang perilaku politik di Indonesia terutama memfokuskan pada perilaku pemilih. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 106.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 106-107.

oleh Afan Gaffar dan J. Kristiadi. Kedua penelitian ini dilakukan dalam rangka menyelesaikan program doktornya. Dan penelitian yang dilakukan oleh M. Ridha Taqwa dan Haidar Nshir untuk menyelesaikan program magisternya.

Studi yang dilakukan Afan Gaffar dengan judul *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*<sup>23</sup>, mempermasalahkan mengapa seseorang secara konsisten memilih partai politik tertentu, meskipun salah satu partai lain, yaitu Golkar (partai pemerintah) melakukan intimidasi dan menekan rakyat untuk memilihnya. Dalam studinya, Gaffar menggunakan pendekatan sosio-religius dari teorinya Geertz mengenai tiga varian agama di Indonesia, yaitu santri, abangan, dan priyayi sebagai variabel penjelas utama. Namun dalam hal ini Gaffar lebih menekankan pada varian abangan dan santri<sup>24</sup>.

Dalam kesimpulannya dikatakan bahwa terdapat cara pandang dan orientasi politik yang berbeda antara komunitas abangan dan komunitas santri. Perbedaan ini menurutnya dapat dijelaskan dengan melihat pada proses sosialisasi politik di kalangan orang-orang desa. Dari analisis tersebut seseorang dapat melihat adanya kecenderungann yang berbeda. Kaum santri cenderung menggunakan lembaga-lembaga Islam, sementara kaum abangan lebih suka menggunakan sarana-sarana sekuler. Namun demikian, yang menonjol dalam proses sosialisasi politik itu adalah orang tua, terutama bapak. Kebanyakan dari responden menyatakan bahwa orang tua merupakan lembaga yang sangat penting dalam membentuk sikap dan perilaku mereka<sup>25</sup>.

Proses sosialisasi di atas akhirnya akan mengarahkan seseorang untuk mengidentifikasikan dirinya atau berafiliasi dengan kelompok atau partai politik tertentu. Dinyatakan dalam studi Gaffar bahwa 72% responden santri menyatakan

---

<sup>23</sup> Afan Gaffar, *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hasl. 4

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 189.

mengidentifikasi dirinya atau berafiliasi kepada partai Islam. Afiliasi ini disebabkan karena orang tua mereka. Hal yang sama terjadi pula pada responden abangan yang berafiliasi kepada partai non-Islam. Mereka (74%) menyatakan alasan memilih adalah karena faktor orang tua. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kaum santri cenderung untuk memilih partai Islam, dan kaum abangan cenderung mendukung partai yang tidak mempromosikan keyakinan-keyakinan Islam. Dengan demikian studi ini menunjukkan bahwa penduduk di desa-desa cenderung memilih partai politik sesuai dengan keyakinan sosio-religius mereka<sup>26</sup>.

J. Kristiadi melakukan studi yang sama tentang perilaku pemilih dengan judul *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia: Studi Kasus Tentang Perilaku Pemilih di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah Pada Pemilihan Umum 1971-1978*. Studi yang dilakukan J. Kristiadi secara khusus ingin mencari penjelasan tentang pilihan (preferensi) politik seseorang dalam suasana kehidupan politik yang didominasi oleh Golkar. Permasalahan yang dikemukakannya adalah upaya untuk menemukan variabel-variabel yang mempengaruhi seseorang dalam mendukung dan kemudian memilih partai politik tertentu. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari variabel-variabel tersebut terhadap perilaku pemilih di kota dan desa<sup>27</sup>.

Berbeda dengan Gaffar yang berangkat dari teori Geertz tentang varian abangan, santri, dan Priyayi, J. Kristiadi menggunakan pendekatan sosial-budaya sebagai upaya untuk menjelaskan perilaku pemilih. Pendekatan sosial-budaya ini diperlihatkan dalam kajiannya tentang pola panutan yang bersumber pada budaya masyarakat paternalistik. Studi ini juga mengkaji hubungan identifikasi kepartaian tokoh panutan dengan identifikasi kepartaian seseorang. Variabel lain yang juga

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 191.

<sup>27</sup> J. Kristiadi, "Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia", dalam *Prisma*, 3, Maret 1996, hal. 74.

dikaji adalah perilaku pemilih dalam kaitannya dengan pemberitaan di media massa dan struktur sosial mereka<sup>28</sup>.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil studi J. Kristiadi adalah, sekalipun terjadi perubahan sosial yang cukup cepat selama kurang lebih dua dasawarsa tersebut, interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia masih paternalistis, terutama antara anggota dan pimpinan masyarakat. Pimpinan masyarakat, baik formal maupun informal, diperlakukan sebagai tokoh panutan. Di antara tokoh-tokoh panutan itu, birokrat merupakan tokoh panutan yang memiliki pengaruh paling besar. Di kota figur panutan dari kalangan birokrasi adalah pegawai negeri, dan dari kalangan agama adalah mubaligh dan guru ngaji. Sementara itu di desa adalah pamong desa, dan dari kalangan agama adalah kyai<sup>29</sup>.

Studi yang lebih khusus tentang perilaku pemilih dilakukan oleh M. Ridha Taqwa dengan judul *Perilaku Politik Umat Islam: Kasus di Lekkong, Enrekang, 1971-1992*. Dikatakan lebih khusus karena Ridha menjadikan umat Islam sebagai subyek pokoknya. Ridha melihat umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia yang memiliki sistem bertindak dan sistem hubungan sosial yang tersusun dalam istitusi syari'ah yang bersumberkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Karena itu umat Islam dalam menentukan sikap dan tindakannya selalu dikaitkan dengan ajaran Islam. Sementara itu Lekkong, yang masuk ke dalam wilayah kabupaten Enrekang, sebagai diketahui juga dikenal sebagai perkampungan Islam. Sebutan ini muncul tidak saja karena masyarakatnya dikenal fanatik, melainkan juga salah satunya karena Lekkong merupakan basis PPP<sup>30</sup>.

Permasalahan yang dikemukakan Ridha dalam studinya antara lain adalah mengapa terjadi perubahan perilaku memilih umat Islam pada tahun 1987 dan 1992,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 74-75.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 87.

<sup>30</sup> M. Ridha Taqwa, "Perilaku Politik Umat Islam: Kasus di Lekkong, Enrekang, 1971-1992", dalam *Prisma*, 3, 1996, hal. 36.

di mana Golkar meraih kemenangan, sementara PPP makin turun. Apakah perubahan perilaku memilih ini disebabkan karena fanatisme keagamaan yang mulai surut, atau umat Islam makin mampu melihat realitas sosial dengan menghubungkannya dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakini?<sup>31</sup>.

Penelitian yang dilakukan Ridha menunjukkan telah terjadinya polarisasi dan perubahan perilaku memilih secara drastis dalam lima kali pemilu. Pada mulanya umat Islam merupakan pendukung utama partai Islam, tetapi kemudian secara bertahap afiliasi mereka beralih kepada partai lain yang tidak berlabel Islam. Golkar sebagai partai pemerintah semakin banyak mendapat dukungan umat Islam. Perubahan itu menurutnya tidak lepas dari faktor internal dan eksternal. Secara internal kondisi sosial ekonomi umat memang memberi peluang intervensi atau keterlibatan pihak luar. Pada saat yang sama partai Islam tidak mampu memberi jalan keluar bagi permasalahan umat. Secara eksternal, Golkar misalnya, mulai menggunakan lembaga-lembaga keislaman dalam kampanyenya. Maka tidak salah ketika umat Islam berpaling kepada Golkar. Studi Ridha secara umum menyimpulkan bahwa perilaku politik, khususnya perilaku memilih, merupakan fungsi dari sikap dan atau situasi sosial, ekonomi, politik, dan kepentingan umat Islam<sup>32</sup>.

Studi yang lebih khusus dilakukan pula oleh Haidar Nashir dengan judul *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*<sup>33</sup>. Permasalahan yang dikemukakan dalam studi Haidar adalah mengenai seberapa jauh kehadiran elit birokrasi dan elit politik mempengaruhi kekuasaan elit dalam kepemimpinan Muhammadiyah yang kemudian mempengaruhi polarisasi sikap politik dalam Muhammadiyah? Dan pola perilaku politik elit Muhammadiyah yang seperti apakah yang dominan dalam kenyataan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 37.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>33</sup> Haidar Nashir, *Perilaku Politik...*

sosiologis di lingkungan Muhammadiyah dan faktor-faktor apa pula yang mempengaruhinya?

Kesimpulan yang diperoleh dari studi yang dilakukan Haidar menunjukkan bahwa elit Muhammadiyah di Pekajangan yang menduduki posisi formal dalam organisasi pada umumnya menunjukkan pola perilaku yang moderat dengan kecenderungan akomodasionis. Di luar pola akomodatif dijumpai pula sebagian kecil kecenderungan perilaku politik yang pragmatis dan idealis dengan tetap berada dalam semangat moderat. Tidak nampak di kalangan elit Muhammadiyah ini kecenderungan perilaku politik yang radikal dengan pola konfrontasi dan revolusioner<sup>34</sup>.

### **Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Agama memiliki tempat yang khusus dalam kehidupan manusia, dan akan mempengaruhi cara kehidupan para penganutnya.
2. Corak pemikiran dan pemahaman keagamaan yang berkembang dalam diri seseorang atau komunitas keagamaan tertentu (aliran atau mazhab) akan memiliki andil pula terhadap pembentukan sikap dan perilaku para pengikutnya.
3. Dalam batas-batas tertentu, perilaku politik seseorang atau suatu komunitas masyarakat, ternyata dapat pula dipengaruhi oleh corak dan pemahaman terhadap agamanya.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 201.

## Daftar Pustaka

- Alfian dan Nazaruddin Syamsudin (ed.). *Profil Budaya Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitti.
- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1990. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Andrain, Charles F. (1992). *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Terj. Luqman Hakim. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Darban. Ahmad Adaby. 2000. *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Terawang.
- Effendi, Bahtiar. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Gaffar, Afan. (1992). *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Geertz, Clifford. 1989. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hunter, Shireen T. (2000) *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*. Terj. Ajat Sudrajat. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- J. Kristiadi. (1996). "Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia", dalam *Prisma*, 3 Maret, 1996.
- Mulkhan, Abdul Munir. (2000). *Islam Murni Dalam Masyarakat Petani*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Nashir, Haidar. (2000). *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*. Yogyakarta: Terawang.
- Parsons, Talcott and Edward Shils. (1962). *Toward a General Theory of Action*. New York: Harper Torchbook.
- Rush, Michel dan Philip Althoff. (1989). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.

- Sastrapratedja (ed.). (1982). *Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Sastroatmodjo, Sudijono (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Prees.
- Schaar, John H. (1970). "Legitimacy in Modern State", *Power and Community: Dissenting Essays in Political Science*. Ed. Philip Green and Sanford Levinson. New York: Vintage Books.
- Shils, Edward. (1961). "Centre and Periphery", *The Logic of Personal Knowledge, Essayas Presented to Karl Polanyi*. London: Routledge and Kegan Paul.
- ..... (1957). "Primordian, Personal, Sacred, and Civil Ties", *The British Journal of Sociology*. 8 Juni 1957.
- ..... (1956). *The Torment of Secrecy*. Glencoe III: The Free Press.
- Smith, Donald Eugene (1985). *Agama dan Modernisasi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- ..... (1970). *Religion and Political Development*. Boston: Little Brown.
- Sudrajat, Ajat (1995). *Din al-Islam: Pengantar Kuliah PAI*. Yogyakarta: UPT Percetakan IKIP Yogyakarta.
- ..... (1997). *Etika Protestan dan Kapitalisme Barat: Relevansinya dengan Islam Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- ..... (1999). *Pemikiran Politik Islam Kontemporer*. Yogyakarta: MKU FPIPS IKIP Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan. (1982). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Taqwa, M. Ridhan. (1996). "Perilaku Politik Umat Islam: Kasus di Lekkong, Enrekang, 1971-1992, dalam *Prisma*. 3 Maret 1996.
- Wach, Joachim (1985). *Ilmu Perbandingan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Voll, John Obert (1997). *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan*. Terj, Ajat Sudrajat. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Zahra, Abu, (ed.), *Politik Demi Tuhan: Menganalisa Religius Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Zainuddin, A. Rahman. (1992). *Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibn Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

